# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

Butarbutar, Elisabeth, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Refika Aditama.

Faisal, Sanapiah, Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fatoni, Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Kurniati, Sengketa pertanahan,, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Jakarta, 2016.

Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010.

Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, Depok : Rajagrafindo, 2019.

Simamora, Janpatar, Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Capiya Publishing, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Yusuf, A. Muri, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Zarqoni, Mohammad Machfudh, Hak Atas Tanah. Prestasi Pustaka : Jakarta. 2014.

Hermit, Herman, Cara *Memperoleh sertipikat Tanah Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda,* Bandung: Mandar maju, 2007.

Chomzah*,* Ali Achmad, *Hukum Pertanahan,* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Istiqomah, Liliek *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Indonesia: Usaha Nasional,1982.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Soimin, S, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung: Alumni, 1989.

Ismaya, Samun, *Hukum Administrasi Pertanahan,*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya,* Jakarta: sinar grafika, 2012.

Maria SW. Sumardjono, *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat,* Jogjakarta : Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan,* Edisi Kedelapan Cetakan Kedelapan belas, Jogjakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press, 2005.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

**JURNAL, SKRIPSI**

Angelin, Sevilla Margareta Rosa, *et.al*, “Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan”, Jurnal Semnastekmu, Semarang, Vol.1, No.1, Desember 2021.

Ramadhani, Rahmat, “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemi Covid-19”, Jurnal Sanksi, Sumatera, Vol.1, No.2, Januari 2022.

Putri, Novrin Wini Dwi, “Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kota Palembang”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

Syafrizka, Muhammad Fajri, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padang”, *Soumatera Law Review*, Volume 3 Nomor 2, 2020.

Wowor, Fingli A, “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah”, *Lex Privatum*, Vol.2 No. 2, April 2014.

Marsella, “Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional”, *Penegakan Hukum,* Volume 2 Nomor 2, Desember 2015.

Mutiara, Resty, “Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Mafia Tanah”, *Lex Latta,* Vol.1 No.2, Februari 2021.

Sahnan, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Ius*, Volume 7 No. 3, Desember 2019.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

Peraturan pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.